Pengaruh Sanksi Administrasi dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan

Tania Nur Fauzia*, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Tanianurfauzia10@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract. Taxation in Indonesia at this time what is happening is that the awareness of taxpayers in paying vehicle taxes is still lacking. From this phenomenon, it can be concluded that the research determines the effect of administrative sanctions and tax collection on compliance with paying vehicle taxes. The type used is descriptive verification method. Based on these variables, data collection uses incidental sampling techniques. The sample used in this study was 100 taxpayers. Then the technique used is multiple regression analysis, F test and t test. First, the classical assumption test is carried out. The data was processed using SPSS 24 software

Keywords: *Administrative Sanctions, Tax Collection, and Compliance with Paying Vehicle Taxes.*

Abstrak. Perpajakan di Indonesia pada saat ini yang terjadi yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan ini dirasa masih kurang. Dari adanya fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian mengetahui pengaruh sanksi administrasi dan penagihan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan. Jenis yang digunakan yaitu metode deskriptif verifikatif. Berdasarkan variabel tersebut maka pengumpulan data menggunakan teknik pengambilan sampel secara incidental. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak. Maka teknik yang digunakan merupakan analisis regresi berganda, uji F dan uji t. Terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Data diolah dengan menggunakan software SPSS 24.

Kata Kunci: *Sanksi Administrasi, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan.*

A. Pendahuluan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum hal ini dikutip dari pernyataan Mardiasmo (2011: 1). Pengertian ini selaras dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesadaran Wajib Pajak ini merupakan suatu itikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan atas kewajibannya. Pelayanan fiskus yang berkualitas dan sesuai dengan prosedur dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dimana kegiatan negara seperti pembangunan nasional dibiayai oleh pajak. Pembangunan nasional yang didanai sulit dilakukan jika tidak ada penerimaan dari sektor pajak. Untuk mengefektifkan pemerataan pembangunan, diperlukan desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengatur secara langsung urusan-urusan di daerah yang kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang ditemui oleh penulis bahwasannya Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung mengidentifikasi sanksi administrasi dan penagihan pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak kendaraan sebesar 6,55%, sedangkan sisanya sebesar 93,45% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya wajib pajak tidak berkontribusi terhadap pembayaran pajak kendaraan. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di SAMSAT Soekarno-Hatta. Peranan penagihan pajak dan sanksi perpajakan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 69.9%.

Indonesia termasuk ke dalam negara yang dinyatakan tidak pernah berhenti melakukan Pembangunan Nasional dalam beberapa tahun terakhir, dan pembangunan akan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pembangunan Nasional memiliki arti sebagai kegiatan yang berlangsung secara intens, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 80% penerimaan Negara Republik Indonesia dinyatakan berasal dari pajak, fungsinya yaitu adalah sebagai salah satu sumber Penerimaan pemerintahan. Fakta yang menunjukkan adanya hal tersebut yaitu didasari dengan tingkat kerendahan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuannya yaitu :

1. Mengetahui pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan.
2. Mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan.

B. Metodologi Penelitian

Dengan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif agar bisa mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerapan sanksi administrasi (X1), penagihan pajak (X2), terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan (Y). Lalu analisis verifikatif dalam penelitian ini digunakan untuk bisa mengetahui variabel independen pada penerapan sanksi administrasi (X1), penagihan pajak (X2), terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan (Y).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi

dan penagihan pajak terlihat signifikan terhadap patuhnya wajib pajak membayar pajak kendaraan. Hal tersebut terjadi dikarenakan Sanksi Administrasi dan Penagihan Pajak yang diterapkan sudah dirasa maksimal dalam penegakannya dengan dilihat dari beberapa indikator.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diperoleh hasil bahwa Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa penagihan pajak yang diterapkan sudah berjalan secara maksimal dengan menggunakan beberapa indikator yaitu prosedur penagihan pajak, dasar penagihan pajak, tindakan dalam penagihan pajak, tata cara dalam penagihan pajak, dan waktu dalam penagihan pajak yang diterapkan.

Hasil penelitian ini mendukung berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mamusu dan Elim (2017) Penagihan pajak secara aktif mengatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan., langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran.

D. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat hasil yang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan.
2. Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan.

Acknowledge

Terima kasih kepada keluarga, dosen pembimbing, dan juga seluruh rekanan yang terlibat dalam penelitian yang saya lakukan serta turut memberikan support, membantu, dan selalu memberikan motivasi kepada saya selama ini.

Daftar Pustaka

- [1] Adriani. (2014). *Teori Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- [2] Direktorat Jenderal Pajak (2016)
- [3] Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [4] Sofianty, D., & Nurhayati, N. (2018). *Statistik Penelitian dengan SPSS*. Program Studi Akuntansi Unisba
- [5] Sofianty, D., & Rini, L. (2020). *SPSS*. Bandung.
- [6] Solehudin, M. (2019, September 26). Retrieved from detiknews
- [7] Wanda, Adi Putra, Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi*. 1(1). 59-65